

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lilirilau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Marioriwawo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Lilirilau Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Soppeng, dijelaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut.

a. Tugas Pokok adalah:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Fungsi meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kecamatan Lilirilau terdiri dari :

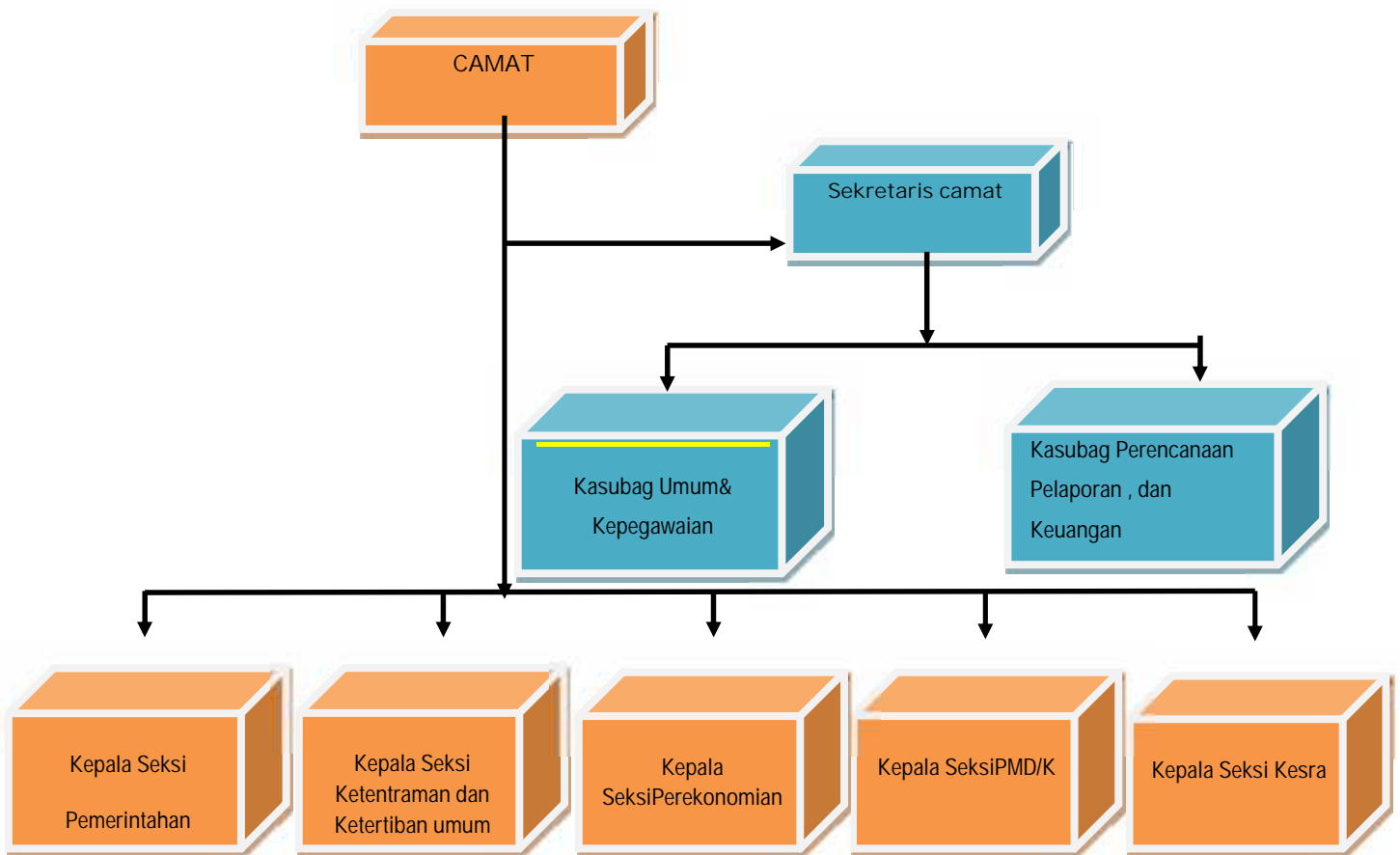
- a. Camat
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
- f. Seksi Perekonomian
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan susunan organisasi Kelurahan Lingkup Pemerintah Kecamatan Lilirilau terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lilirilau adalah sebagai berikut:

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lilirilau adalah sebagai berikut:



D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Lilirilau dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Lilirilau pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilepaskan dengan

permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Soppeng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lilirilau, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menetapkan kebijakan startegis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian kinerja Kecamatan Lilirilau dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Selama periode 2017 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh SKPD Kecamatan Lilirilau yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut pada tabel ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Camat Lilirilau. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun.

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Peningkatan Pelayanan Perizinan (S1)	Presentase izin yang diterbitkan tepat waktu	87%
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Umum dan Keuangan (S2)	Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%
Peningkatan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	100%
Peningkatan Peran pemerintah kecamatan sebagai Fasilitator dan Mediator	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100%
Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	75
	LPM Aktif	100

Lembar / dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2017 terlampir.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2 : Program dan kegiatan

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2017
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100 %
	Penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perzinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan	200 buah
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	64 set
	Bimbingan tehknis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	2 orang
	Program pelayanan perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %
	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 Kali
	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	3 orang/30 jenis
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 jenis
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 terbitan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	12 kali
Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	320 kali	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	7 unit

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 unit
	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleur yang diadakan	8 unit
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	8 unit
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit
	Pemeliharaan rutin berkala pralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit
Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator, (S3)	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	5 rekomendasi
	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali
Meningkatnya peran fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (S4)	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%
	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa
	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, Imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	115 orang
	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	123 orang
	Fasilitasi kader Posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	135 orang

Tabel 2.3. Indikator Program pada RPJMD

NO	Indikator RPJMD	Target 2017
(1)	(2)	(3)
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan;	50
2	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Lilirilau merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja Tahun 2017, target dan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Camat Lilirilau sebagaimana terlampir.

Indikator kinerja tersebut merupakan suatu ukuran untuk lebih fokus dalam melihat kinerja Kecamatan Lilirilau sebagai lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian, didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, kelengkapan dan akurasi data dan informasi ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.

Secara umum kinerja Kecamatan Lilirilau tahun 2017 cukup berhasil, dengan rata-rata pencapaian sebesar 100 persen. Pencapaian tersebut diukur dari indikator sasaran strategis Kecamatan Lilirilau yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai.

Adapun pencapaian tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI
1	2	3	4
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan (S1)	Presentase izin yang diterbitkan tepat	100%

		waktu	
2.	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Administrasi Umum dan Keuangan (S2)	Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100 %
3.	Peningkatan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	99,58%
4.	Peningkatan Peran pemerintah kecamatan sebagai Fasilitator dan Mediator	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100%
5.	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	100%
		LPM Aktif	
PENCAPAIAN RATA RATA			100%

1. Analisis Capaian Kinerja SKPD

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut

Sasaran-1

Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Sasaran ini merupakan sasaran barupa dan perjanjian kinerja Tahun 2017. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kerjanya.

Tabel 3.1 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %	
1	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	87	100	114,94	100

Tingkat pencapaian Sasaran-3 dengan indikator kinerja **Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu** dengan target 87% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 114,94%. Realisasi capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Persentase Capaian Rekomendasi

NO	JUMLAH PERMOHONAN IZIN YG DITERIMA	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKANI	PERSENTASE
1	106	106	100%
JUMLAH	106	106	100%
PERSENTASE RATA-RATA			100%

Perizinan disini dimaksudkan adalah segala jenis surat izin atau bahan kelengkapan untuk mengajukan Perizinan lebih lanjut ke Instansi terkait, yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO yaitu surat yang isinya menyatakan bahwa tidak ada rasa keberatan atau merasa terganggu terhadap lokasi usaha tersebut, SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, dan Surat Izin Jalan (bepergian)

Indikator persentase izin yang diterbitkan yang diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi total perizinan yang diterima dikali 100 %.

➤ Rumus : $\frac{\text{Rekomendasi}}{\text{Rekomendasi}} \times 100 = 100 \%$

Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan Lilirilau dan masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1 dengan indikator kinerja sasaran **persentase izin yang diterbitkan tepat waktu**, meliputi; **Program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)** dengan kegiatan; Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran-2

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya setelah dilakukan kuisioner.

Tabel 3.11: Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
1	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100	100%	100%	-	100

Tingkat pencapaian Sasaran-2 dengan indikator kinerja persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12 : Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan

NO	JUMLAH PEGAWAI YANG MERASA PUAS	JUMLAH SELURUH PEGAWAI	PERSENTASE
1.	56	56	100%
JUMLAH	56	56	100%
Persentase Rata-rata			100%

Indikator kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah pegawai yang merasa puas dibagi total Jumlah pegawai dikali 100 %.

➤ Rumus : $56 \text{ pegawai} \times 100 = 100\%$

56 pegawai

Sasaran ini sepenuhnya tercapai karena pemenuhan kebutuhan pegawai atau kesejahteraan pegawai sudah maksimal, sehingga pegawai merasa puas atas pelayanan administrasi umum dan keuangan.,peningkatan profesionalisme aparat dan peningkatan administrasi perkantoran

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-2 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan** meliputi;

- Program peningkatan profesionalisme aparatur

dengan kegiatan;

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

- Program pelayanan administrasi perkantoran

dengan kegiatan;

- a. Pelayanan jas komunikasi dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan logistic kantor
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

dengan kegiatan;

- a. Profil kelurahan

Sasaran-3

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kerjanya.

Tabel 3.9: Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	99,58	99,58	-	100

Tingkat pencapaian Sasaran-3 dengan indikator kinerja **persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** dengan target 100% terealisasi 95,05% dengan capaian kinerja sebesar 99,58%. Realisasi capaian sedangkan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2017 mencapai 99,58 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10 : Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

NO	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI RUSAK	JUMLAH TOTAL SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE
1.	481	2	479	99,58%
JUMLAH	481	2	479	99,58%
Persentase rata-rata				99,58%

Indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi total Jumlah sarana dan prasarana dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{479}{481} \times 100 = 99,58 \%$$

Sasaran ini tidak tercapai disebabkan adanya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi rusak (tidak terpakai)

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-4 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi**

baik meliputi; **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** dengan kegiatan;

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Sasaran-4

Peningkatan peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator dan mediator

Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.

Tabel 3.3 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %		
1	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100

Tingkat pencapaian Sasaran-4 dengan indikator kinerja **Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti** dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 : Persentase Capaian Rekomendasi

NO	JUMLAH REKOMENDASI YG DITERIMA	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE

1	4	4	100%
JUMLAH	4	4	100%
PERSENTASE RATA-RATA			100%

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu, sehingga Rekomendasi yang dimaksud disini adalah saran atau permasalahan yang dihadapi masyarakat yang diungkapkan pada saat pelaksanaan kegiatan Bupati Menyapa dan penyuluhan Kantibmas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban.

Indikator persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi yang diterima dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{4 \text{ rekomendasi}}{4 \text{ rekomendasi}} \times 100 = 100 \%$$

Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan Lilirilau, masyarakat dan dengan pihak Kepolisian Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1 dengan indikator kinerja sasaran **persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**, meliputi; **Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan** dengan kegiatan; Bupati menyapa dan Penyuluhan Kamtibmas.

Sasaran 5

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.

Tabel 3.1 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %	
1	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	75	100	133	75

Tingkat pencapaian Sasaran-2 dengan indikator kinerja **Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai** dengan target 75% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 133%. Realisasi Capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Persentase RKPDes yang dicapai

NO	NAMA DESA	RKPDes	JUMLAH KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	DESA KEBO	√	12	12	12	100%
2.	DESA DESA PAROTO	√	9	9	9	100%
3.	DESA BARINGENG	√	16	16	16	100%
4.	DESA MASING	√	7	7	7	100%
5.	DESA PARENRING	√	9	9	9	100%
6.	DESA TETEWATU	√	10	10	10	100%
7.	DESA PALANGISENG	√	8	8	8	100%
8.	DESA ABBANUANGE	√	12	12	12	100%
JUMLAH			83	83	83	100%
Persentase rata-rata						100 %

Hal ini dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan terlaksananya kegiatan Pendampingan pengelolaan Dana ADD di desa berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan Lilirilau, Para pendamping desa dan Tim Pengelola ADD desa.

Indikator Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai dibagi total target kinerja dalam RKPDes dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{83 \text{ kegiatan}}{83 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-2 dengan indikator kinerja sasaran **persentase target kinerja RKPDes yang tercapai** meliputi; **Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa** dengan kegiatan; Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di desa.

Sasaran-3

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan

Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya.

Tabel 3.5 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-5

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Target Tahun 2021
		Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja %	
1	LPM aktif	100	100	100	100

Tingkat pencapaian Sasaran-5 dengan indikator kinerja **LPM aktif** dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Persentase LPM aktif

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM Aktif	PERSENTASE
1.	KEL. UJUNG	1	1	100%
2.	KEL. CABENGE	1	1	100%
3.	KEL. PAJALESANG	1	1	100%

4.	KEL. MACANRE	1	1	100%
JUMLAH		4	4	100%
Persentase rata-rata				100%

Indikator LPM aktif diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah LPM Aktif dibagi total Jumlah LPM dikali 100 %.

$$\text{➤ Rumus : } \frac{4 \text{ LPM aktif}}{4 \text{ LPM}} \times 100 = 100 \%$$

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-2 dengan indikator kinerja sasaran **LPM aktif** meliputi; **Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan** dengan kegiatan; pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dan **Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan** dengan kegiatan fasilitasi kader Posyandu.

Tabel 3.13 : Realisasi dan Capaian Program/Kegiatan

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target 2017	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan perizinan (S1)	Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan	200 buah	106 buah	53,00 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	64 set	64 set	100 %
	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	4 PNS	4 PNS	100 %
	Program pelayanan perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 Kali	12 Kali	100 %
	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 unit	2 unit	500 %

pengelolaan administrasi umum dan keuangan	dinas/operasional					
					100 %	
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	3 orang/28 jenis	30 orang/30 jenis	100 %	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	11 jenis	11 jenis	100 %	
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 terbitan	12 terbitan	100 %	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	12 kali	26 kali	216,66 %	
	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	320 kali	320 kali	100 %	
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	32 paket	32 paket	100 %	
	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Profil Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	100%	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100 %	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	7 unit	13 unit	185,71 %	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 unit	3 unit	37,50 %	
	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	8 unit	10 unit	100 %	
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah/luas gedung kantor	8 unit	7 unit	87,50 %	
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara				
			Roda 4	1 Unit	1 Unit	100 %
			Roda 2	15 Unit	15 Unit	100 %
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	16 unit	100 %		
Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100 %	

dan mediator,(S4)	kecamatan				
	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	100 %
Meningkatnya peran fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan (S5)	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	50 orang	50 orang	100 %
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina	100%	100%	100 %
	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	8 desa	100 %
	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, Imam masjid kelurahan dan penghulu syara Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	115	117	101,73 %
			135	123	91,11 %
	Fasilitasi kader Posyandu kelurahan	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	123	135	109,75 %

Program Administrasi Terpadu Kecamatan tidak terealisasi Keuangan karena terlambatnya Regulasi yang tetap dari SKPD terkait yaitu Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kab. Soppeng tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 3.14. Realisasi dan Capaian Indikator Program pada RPJMD

NO	Indikator RPJMD	Target 2017	Realisasi	Capaian	Indikator Renstra yang mendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan,	85	50	50	- Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu - Persentase rekomendasi yang

NO	Indikator RPJMD	Target 2017	Realisasi	Capaian	Indikator Renstra yang mendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	desa/ kelurahan;				ditindaklanjuti - Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan

2. Akuntabilitas Keuangan

untuk mengetahui akuntabilitas keuangan maka dilakukan analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja, rencana penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2017 sebanyak 5 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja sebesar Rp. 75.851.300 dan terealisasi sebesar Rp. 75.800.975 atau 99,93%.

Rencana dan realisasi penggunaan anggaran untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 : analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Keterangan
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai Fasilitator	62.000.000	62.000.000	100	100	efisien

2	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	13.851,300	13.800.975	99,63	100	efisien
---	---	------------	------------	-------	-----	---------

Keterangan :

- Efisien jika rata-rata capaian kinerjanya lebih tinggi dibanding serapan anggarannya.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja SKPD Kecamatan Lilirilau tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 4.757.292.936- dengan realisasi sebesar Rp. 4.618.676.692,- yang terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dianggarkan sebesar Rp. 3.170.148.736,- dan terealisasi sebesar Rp 3.099.125.575,- (97,76%) digunakan untuk membiayai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Tahun 2107		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.170.148.736	3.099.125.575,	97,76

- b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp1.587.144.200,- dan terealisasi sebesar Rp Rp1.519.551.117,- (95,74%), dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 : Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	59.850.000	59.850.000	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.295.764.700	1.244.978.927	96,00
3	Belanja Modal	231.529.500	214.722.190	92,74

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Lilirilau tahun 2017 sebesar Rp. 1.309.697.873,- dan terealisasi sebesar Rp 1.243.570.463,- (94,95%), sebagaimana rincian pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 : Total Realisasi Anggaran
SKPD Kecamatan Lilirilau Tahun 2017**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung	3.170.148.736	3.099.125.575	97,76
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.971.700	451.916.199	96,16
	Pelayanan Jasa Komunikasi. - sumber daya air dan listrik	39.607.675	30.255.704	76,39
	Penyediaan Jasa pemeliharaan - dan perizinan kendaraan	1.610.000	1.127.520	70,03
	Operasional			
	Penyediaan Layanan - Kebersihan Kantor	21.686.000	21.251.000	97,99

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4.917.000	4.902.000	99,69
	bangunan kantor			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	19.140.000	19.065.000	99,61
	Undangan			
	Penyediaan bahan logistik kantor	4.160.000	4.160.000	100,00
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam & luar daerah	157.916.200	150.314.900	95,19
	Peningkatan Pelayanan Adm. Perkantoran	220.934.825	220.840.075	99,96
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	382.451.200	370.183.490	95,05
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	102.009.000	101.301.690	99,31
	- Pengadaan Terali	5.650.000	5.650.000	100,00
	- Printer	13.230.000	12.822.690	96,92
	- Sound Sistem	30.000.000	30.000.000	100,00
	- Kipas Angin	3.274.000	3.274.000	100,00
	- Dispenser	2.500.000	2.500.000	100,00
	- Mesin Pemotong Rumput	8.410.000	8.410.000	100,00
	- Sekat Ruangan	6.005.000	6.005.000	100,00
	- Papan Data	1.600.000	1.600.000	100,00
	- Lemari	6.700.000	6.700.000	100,00
	- Kursi Tunggu	7.400.000	7.400.000	100,00
	- Layar Proyektor	2.750.000	2.750.000	100,00

	- Wariless	5.000.000	4.700.000	94,00
	- Komputer Pc	9.490.000	9.490.000	100,00
	Pengadaan Peralatan Gedung - Kantor	45.880.500	45.880.000	100,00
	- Komputer PC	12.000.000	9.177.000	100,00
	- Printer	3.850.500	3.850.500	100,00
	- Website	30.000.000	30.000.00	100,00
	- Pengadaan Meubelair	87.550.000	71.450.000	81,61
	- Kursi Kerja	10.800.000	1.800.000	16,67
	- Lemari Arsip	16.250.000	9.150.000	56,31
	- Kursi Rapat	60.500.000	60.500.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala - Gedung Kantor	26.900.000	26.900.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala - Kendaraan Dinas / Operasional	118.951.700	116.491.300	97,93
	Pemeliharaan Rutin/Berkala - Peralatan Kantor	8.160.000	8.160.000	100,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97.970.000	89.350.453	91,20
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	47.100.000	47.100.000	100,00
	- Bintek Peraturan Perundang-undangan	50.870.000	42.250.453	83,06
IV	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	21.600.000	0	0,00
	Penyelenggaraan Pelayanan - Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	21.600.000	0	0,00
V	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	62.000.000	62.000.000	

	Kecamatan			
	- Bupati Menyapa	50.000.000	50.000.000	100,00
	Penyuluhan Kamtibmas	12.000.000	12.000.000	100,00
VI	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	518.151.300	518.100.975	99,99
	- Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	13.851.300	13.800.975	99,64
	- Fasilitasi Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	222.00.000	222.000.000	100,00
	- Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	160.800.000	160.800.000	100,00
	- Fasilitas Kader Posyandu	121.500.000	121.500.000	100,00
	Program Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	- Profil Kelurahan	28.000.000	28.000.000	100,00
	J u m l a h	4.757.292.936	4.618.676.692	97,09

Rata-rata capaian diatas 90% kecuali, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik sebesar 76,39%, i sebabkan karena Jasa Listrik, Jasa Telpon hanya Rp30.255.704 yang yang di bayar selama 1 (satu) tahun dari Rp39.607.675. ditargetkan, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar 76,39%, disebabkan karena pajak kendaraan yang dibayarkan tahun 2017 hanya Rp1.127.520 dari Rp. 1.610.000 yang ditargetkan, Pengadaan Mebeulair realisasi hanya 81,61% karena terealisasi hanya Rp. 71.450.000 dari Rp. 87.550.000 yang ditargetkan, hal disebabkan

karena adanya 2 (dua) belanja modal pengadaan mebeulair tidak terealisasi Dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, capaian sebesar 83,06% disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada anggaran perubahan sehingga penambahan anggaran berlebih dari jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Bimtek dengan realisasi anggaran Rp. 42.250.453 dari target Rp. 50.870.000.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Kecamatan Lilirilau Tahun 2017. Pembuatan laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Lilirilau Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lilirilau dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun 2017 Kecamatan Lilirilau menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 87% atau interpretasi memuaskan.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan.

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75 % atau interpretasi memuaskan

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75% atau interpretasi memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lirilau dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lirilau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp**4.757.292.936** sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp**4.618.676.692** atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,09%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Lirilau telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp Rp1.587.144.200 dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp1.519.551.117 atau 95,74%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lirilau telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Lirilau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lirilau ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lirilau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Soppeng.

Cabenge, Januari 2018

CAMAT LILIRILAU,

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19700518 199803 1 007

